

**FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM
MENAMPUNG DAN MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA BIDANG
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BANGSAL ACEH KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI**

Oleh:

Muhammad Juli

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Zaini Ali

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: zaini.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai *masih tetap berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor; 04 tahun 2007*, untuk itu keberadaan LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan *fungsi LPMK yang optimal*, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor 04 tahun 2007, tentang Lembaga kemasyarakatan dikelurahan, dan tentunya harus saling berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kami menilai kurang seriusnya pihak LPMK menanggapi permasalahan ini, karena untuk sama-sama kita ketahui bahwa Ketua LPMK juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin, hal ini tentu akan menyita banyaak waktu ditambah lagi hubungan kerja intern LPMK kurang berjalan dengan baik. Jadi harapan saya LPMK harus dinakhodai oleh orang yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ”

Kata Kunci: Fungsi Lembaga, Pembedayaan, Menampung dan Mewujudkan Aspirasi

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi yang terdiri dari daerah Kabupaten dan Kota, dimana setiap daerah tersebut dibentuk pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Demi tertatanya pemerintahan daerah yang baik maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan membawa berbagai perubahan. Secara struktural, Pemerintah kelurahan dibawah camat. Di dalam PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan pasal 10-11 yang berbunyi bahwa di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari sekian banyak jumlah kemasyarakatan penulis hanya akan membahas tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha kegiatan pembangunan demi tercapainya percepatan kesejahteraan bagi masyarakat. Usaha tersebut tentunya melalui aktualisasi fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.

Pelaksanaan fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai *masih tetap berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor; 04 tahun 2007*, untuk itu keberadaan LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan *fungsi LPMK yang optimal*, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor 04 tahun 2007, tentang Lembaga kemasyarakatan di kelurahan, dan tentunya harus saling berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya.

Pada zaman Orde Baru dimana Negara menganut sistem Sentralisasi/ pemerintahan terpusat, penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme Top Down, yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Tetapi sekarang di Era Reformasi semuanya jadi berubah yang mana sistem Perencanaan Pembangunan menggunakan mekanisme Bottom Up, dimana proses perencanaan dimulai dari tingkat bawah yang merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat itu sendiri melalui Musyawarah Pembangunan (MusrenBang), dengan harapan apa yang telah direncanakan pemerintah bersama masyarakat, merupakan kebutuhan riil dilapangan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pelaku dan penikmat dari hasil pembangunan yang dilaksanakan nantinya, sehingga pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien karena rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan tersebut sudah dipastikan sangat tinggi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pembangunan, dibentuklah suatu lembaga yang diharapkan dapat menampung dan mewujudkan keinginan masyarakat tersebut, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah harus dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Lembaga yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah LPMK.

Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa kegiatan kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi

atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan.

KERANGKA TEORI

Konsep Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya Pembangunan.²

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:³

1. Partisipasi (*participation*) Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.
2. Penegakan hukum (*rule of law*) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
3. Transparansi (*transparency*) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang

¹ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

² Ibid., hlm.3

³ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182 (<http://digilib.uinsby.ac.id/9402/5/Bab%202.pdf>)

- kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
4. Responsif (*responsiveness*) Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan-kepentingan bersama.
 5. Konsensus (*consensus orientation*) Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
 6. Kesetaraan dan keadilan (*equity*) Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
 7. Efektifitas dan efisien Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.
 8. Akuntabilitas Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
 9. Visi Strategi (*strategic vision*) Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu kiranya pemerintah menggandeng berbagai elemen yang ada di masyarakat, agar supaya dapat meringankan atau mengurangi campur tangan pihak pemerintah yang terlalu jauh dalam hal-hal yang sifatnya tidak terlalu prinsip, dan memberi kesempatan bagi pihak masyarakat atau lembaga-lembaga yang ada seperti swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah bisa memrankan secara aktif dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut dan dengan demikian diharapkan agar dapat lebih eksis kedepannya.

Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni; “ proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan

hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa⁴

Konsep Fungsi

Fungsi adalah jabatan atau kedudukan⁵. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.⁶ Fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan harapan dapat tercapai apa yang diinginkan.⁷ Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.⁸

Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social-institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepadan mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social-institution tersebut. Ada yang menggunakan istilah pranata-sosial, tetapi social-institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Antropologi (Jakarta: Penerbit; Universitas, 1964) hlm. 113. Mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.⁹ Menurut Hayami dan Kikuchi dalam (Mardikanto : 2002), kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari-hari kelembagaan sering diartikan sebagai institusi sosial atau pranata sosial tetapi sering juga diartikan sebagai organisasi sosial.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian Kualitatif berupaya mengungkapkan berupa kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan

⁴ Sedarmayanti, 2004. " Good Governance (*Kepemerintahan yang baik*) hal.5

⁵ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain " *Kamus Umum Bahasa Indonesia* " 1996:412

⁶ Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6087/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN ABD.%20RASYID.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6087/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN%20ABD.%20RASYID.pdf?sequence=1)

⁷ Michael J. Jucius (dalam Soesanto, 1974:57)

⁸ The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: " *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi 10 Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar* ", 2008),

⁹ Koentjaraningrat , (*Pengantar Antropologi*), dalam Prof.Dr. Soerjono Soekanto. Dra. Budi Sulityowati, MA, " *Sosiologi Suatu Pengantar* ", (Edisi Revisi-45- Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm.171.

visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dalam problematika kehidupan setiap individu yang terlibat didalam penelitian.¹⁰

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan Kelurahan Bangsal Aceh merupakan pintu gerbang bagi orang-orang atau masyarakat yang hendak memasuki Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kelurahan Bangsal Aceh juga merupakan pintu masuk bagi daerah tetangga seperti Rokan Hilir dan juga provinsi Sumatra Utara yang hendak menuju Kota Dumai. Karena merupakan pintu masuk dari daerah lain maka dapat dipastikan bangsal Aceh merupakan cerminan dari sebagian wajah Kota Dumai jika di bangsal Aceh berdiri bangunan-bangunan megah dan Pabrik-pabrik besar memberi penilaian tersendiri bagi orang-orang atau masyarakat pendatang dari daerah lain bahwa kota dumai itu megah, dan jika sebaliknya di Bangsal Aceh tidak menggambarkan bangunan yang megah dan terdapat jalan-jalan yang rusak atau berlobang maka penilaian orang terhadap kota Dumai akan rendah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menetapkan Kelurahan Bangsal Aceh sebagai Lokasi Penelitian. Berdasarkan pengamatan dilapangan tentang fungsi LPMK, khususnya dalam membantu Lurah untuk mewujudkan Pembangunan dan jika di bandingkan dengan fungsi LPMK yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Dumai, nomor 04 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan apa yang di harapkan, dimana dapat dilihat minimnya pembangunan yang terdapat di Kelurahan Bangsal Aceh, masih adanya jalan dan jembatan yang rusak kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian hasil dari permasalahan yang ditemukan didalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh agar lebih berperan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai mitra Lurah dalam kegiatan Pembangunan.

PEMBAHASAN

Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarkat dalam pembangunan

Kegiatan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata namun juga harus melibatkan masyarakat, dengan demikian masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan partisipasi atau keikut sertaannya pada kegiatan pembangunan. LPMK sebagai wadah masyarakat kelurahan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan.

Agar hasil suatu pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan maka setiap tujuan pembangunan haruslah tepat sasaran dan diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika kehidupan masyarakat, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan usulan, masukan, ide serta gagasan yang berhubungan dengan pembangunan. Hal tersebut dapat di sampaikan kepada pihak LPMK untuk ditindak lanjuti atau direalisasikan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan (MusRenBangKel) tentunya diurutkan berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau skala prioritas dengan berpatokan pada ketersediaan anggaran.

Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka

¹⁰ Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. “ *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* “ ; (PT Bumi Aksara, Jakarta 2013).hlm.141.

untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan yaitu Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai wakil rakyat di Kelurahan adalah sebagai tempat bagi masyarakat kelurahan untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan, kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut agar disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan .

Dari hasil wawancara ini dapat diartikan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab pihak LPMK dalam usaha memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut sampai ketinggian pembahasan perencanaan pembangunan yang lebih tinggi sehingga kesannya LPMK hanya sekedar menampung aspirasi kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah pada proses pelaksanaannya, dan kesannya LPMK hanya menunggu hasilnya tanpa mau memperjuangkan sampai terealisasinya aspirasi masyarakat tersebut.

Kondisi tersebut semakin akan membuat masyarakat tidak peduli dengan kegiatan pembangunan, karena masyarakat beranggapan mereka bukanlah bagian dari kegiatan pembangunan. Pembangunan hanya menjadi tugas dan kewenangan pemerintah secara penuh.

Disuatu sisi kita melihat perlunya upaya oleh pihak pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan LPMK ditengah lingkungan masyarakat, dilain pihak ada sebagian masyarakat sudah tau tentang tugas dan fungsi LPMK namun mereka sudah terlanjur menilai bahwa LPMK tidak mampu untuk bekerja maksimal dalam memberdayakan masyarakat, sehingga keberadaan LPMK belum memberikan pengaruh yang berarti guna meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Maka diharapkan sudah sepantasnyalah LPMK harus bisa bersinergi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan seperti RT, Karang Taruna, PKK, dan

Pos Yandu serta pihak dunia usaha dalam memanfaatkan dana kepedulian pihak swasta terhadap masyarakat dilingkungan perusahaan yang sering kita dengar dengan istilahnya CSR (*coorporate social responsibility*).

Adapun alasan yang dapat dikemukakan oleh pemerintah kelurahan yaitu keterbatasan anggaran yang sering menjadi kendala setiap tahunnya. Alasan tersebut tersebut tentunya harus menjadi perhatian oleh pemerintah kota atau ditingkat lebih tinggi, agar anggaran untuk pembangunan kelurahan lebih dimaksimalkan lagi.

Penyusun Rencana, Dan Pengawas Pembangunan Secara Partisipatif

Untuk mendapatkan suatu hasil pembangunan yang baik harus dimulai dari perencanaan yang matang kemudian pelaksanaan dan dilanjutkan dengan pengawasan mulai dari pelaksanaan pembangunan dimulai sampai pembangunan itu selesai dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dalam membuat program kerja LPMK dan melaksanakan usulan musrenbang sangat diperlukan. Target menjadikan usulan masyarakat menjadi prioritas pembangunan di Kelurahan tercapai karena usulan yang disuarakan LPMK menjadi daftar usulan prioritas Musrenbang tingkat Kelurahan.

Di Era Reformasi sistem Perencanaan Pembangunan menggunakan mekanisme Bottom Up, dimana proses perencanaan dimulai dari tingkat bawah yang merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat itu sendiri melalui Musyawarah Pembangunan (MusrenBang), dengan harapan apa

yang telah direncanakan pemerintah bersama masyarakat, merupakan kebutuhan *riil* dilapangan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pelaku dan penikmat dari hasil pembangunan yang dilaksanakan nantinya, sehingga pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien karena rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan tersebut sudah dipastikan sangat tinggi. Di kelurahan Bangsal Aceh dalam menyusun dan menetapkan kerangka program pembangunan dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kegiatan tersebut diikuti oleh LPMK, Kecamatan, Kelurahan, RT, puskesmas, Babinsa Kecamatan dari Kodim, BabinKamtibmas dari Polsek Kecamatan dan tokoh masyarakat.

Dengan melibatkan beberapa lembaga dan organisasi yang ada didesa maka di harapkan rencana program pembangunan bersumberkan dari masukan dan usulan masyarakat yang disampaikan masing-masing lembaga dapat terealisasi, diharapkan setiap lembaga dan perwakilan dari penyampai aspirasi masyarakat sudah harus terlebih dahulu menyiapkan usulan pembangunan yang ingin disampaikan pada penentu kebijakan.

Dengan sesering mungkin melakukan pertemuan atau musyawarah baik antara sesama anggota LPMK maupun bersama masyarakat dan pihak kelurahan maka akan terjalin komunikasi yang baik dan diharapkan akan timbul ide-ide cemerlang dari setiap peserta rapat, dan diharapkan segala permasalahan bisa dicari solusinya. Namun kondisi dilapangan yang peneliti jumpai belumlah seperti yang diharapkan hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa kurang harmonisnya hubungan antara ketua LPMK dengan anggota. Hal ini juga dapat menyebabkan kurang berjalannya dengan baik fungsi-fungsi LPMK itu sendiri oleh karena LPMK ini merupakan suatu tim kerja, yang mana setiap sub sistem saling berkaitan dengan yang lainnya, apabila suatu sub sistem tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi kerja tim yang lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap para informan menunjukkan bahwa kinerja LPMK secara *responsive* dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif sudah dilaksanakan namun untuk kinerja dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan belum berhasil dilaksanakan.

Penumbuhkembangan Dan Penggerak Prakarsa Dan Partisipasi, Serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Sesuai dengan dasar pembentukan LPMK yakni sebagai penggerak dan pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu LPMK sebagai pemersatu nilai- nilai sosial yang tengah berkembang di masyarakat untuk mempersatu dan meningkatkan semangat kebersamaan sebagaimana yang telah dicirikan dalam kehidupan masyarakat kelurahan yang saling bahu-membahu kerja bersama-sama dalam melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. *Output* kegiatan ini adalah mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Secara praktis kegiatan ini telah tercapai, hal ini ditandai dengan kegiatan gotong royong yang mampu difasilitasi oleh LPMK dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Namun secara strategis *output* kegiatan ini masih jauh antara target dan realisasi karena kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh LPMK belum mampu mendorong kembali menguatnya budaya gotong royong di tengah masyarakat.

Tantangan yang paling besar dihadapi oleh LPMK sebagai lembaga yang tidak mencari keuntungan didalamnya dan bersifat sosial adalah bergantung sepenuhnya kepada pihak

pemerintah dalam hal-hal untuk melakukan kegiatan yang idikasinya pada kegiatan yang memerlukan sarana dan juga dana, kemudian juga tantangan untuk meyakini masyarakat mau bersama-sama melakukan kegiatan demi terwujudnya pembangunan kelurahan dimasa depan. Hal ini senada dengan hasil wawancara kami dilapangan dengan ketua LPMK, Bapak M.Amin, mengenai permasalahan kurang berjalannya dengan baik fungsi-fungsi LPMK, , ia mengatakan bahwa:

Sangat sulit pada zaman ini untuk membuat orang menjadi sadar untuk mau meluangkan waktunya secara percuma dalam hal-hal yang bersifat sosial atau suatu usaha yang dibuat tanpa ada imbalannya. Untuk meningkatkan semangat kerja LPMK yang tinggi seharusnya kami ini sudah ada suatu tempat khusus (kantor) tersendiri. Tapi nyatanya masih numpang di kantor kelurahan, sehingga membuat kami tidak leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan juga pembangunan.

Hal ini dimaksudkan bahwa untuk meyakinkan sebagian orang atau masyarakat perlu suatu cara pendekatan yang baik untuk memujuk masyarakat tersebut supaya mau melakukan apa yang menjadi suatu keinginan atau tujuan kita. Dalam hal untuk memberdayakan masyarakat, anggota LPMK harus di isi oleh orang-orang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi, tidak mudah putus asa dan harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan LPMK yang di gelutinya.

Didalam peraturan Daerah Kota Dumai nomor : 04 Tahun 2007, berkaitan dengan tugas dan fungsi LPMK, maka diharapkan LPMK mampu sebagai roda penggerak bagi masyarakat dalam hal penataan hasil pembangunan, pembangkit semangat gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam mengahdapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pengembangan dan pembinaan wilayah.

Masyarakat Kelurahan (LPMK) diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha kegiatan pembangunan demi tercapainya percepatan kesejahteraan bagi masyarakat. Usaha tersebut tentunya melalui aktualisasi fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.

Suatu hal yang dapat digaris bawahi tentang pemberdayaan masyarakat berikut kami kutip dari hasil wawancara peneliti dengan Lurah Bangsal Aceh, Bapak Nurzerwan. SE., M.Si. yang mengatakan:

“Untuk menjadikan masyarakat berdaya adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal-hal kemasyarakatan seperti pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dengan melimpahkan kewenangan secara utuh, sehingga masyarakat itu sendiri memiliki tanggung jawab secara moral terhadap apa yang telah dilaksanakannya demi kepentingan bersama. Namun hasil pembangunan tetap harus terpantau oleh pihak kelurahan sebagai laporan pertanggung-jawaban”.

Berikut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Hadamean Pulungan ; Ketua RT 06 Kelurahan Bangsal Aceh. “Ketua RT; sudah satu tahun lebih pelantikan anggota LPMK namun sejauh ini belum nampak secara nyata apa-apa yang telah dibuat oleh LPMK bersama anggotanya. Diperkirakan satu bulan setelah pelantikan diperkirakan awal bulan febuari 2014 pihak kelurahan ada mengusulkan pembuatan gerbang/ pintu masuk menuju kelurahan Bangsal Aceh kepada pihak perusahaan PT.Meridan SP, yang berada di kawasan Kelurahan Bangsal Aceh, setelah diadakan

pertemuan dengan ketua LPMK bersama pihak perusahaan saat ini belum terealisasi. Kami menilai kurang seriusnya pihak LPMK menanggapi permasalahan ini, karena untuk sama-sama kita ketahui bahwa Ketua LPMK juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin, hal ini tentu akan menyita banyaak waktu ditambah lagi hubungan kerja intern LPMK kurang berjalan dengan baik. Jadi harapan saya LPMK harus dinakhodai oleh orang yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ”

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi LPMK kelurahan Bangsal Aceh dalam meningkatkan pembangunan tidak terlaksana dengan baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 3 (tiga) fungsi LPMK yang dijadikan sebagai indikator, yakni :*Pertama*, Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. *Kedua*, Penyusun rencana, dan pengawas pembangunan secara partisipatif. *Ketiga*, Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, jika di dikaitkan dengan hasil wawancara menyatakan tidak baik atau tidak terlaksana.
2. Masih ditemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi LPMK kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai sembilan, antara lain;
 - a. Kurangnya rasa tanggung jawab pihak LPMK dalam usaha memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai ketinggian pembahasan perencanaan pembangunan yang lebih tinggi sehingga kesannya LPMK hanya sekedar menampung aspirasi kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah pada proses pelaksanaannya, dan kesannya LPMK hanya menunggu hasilnya tanpa mau memperjuangkan sampai terealisasinya aspirasi masyarakat tersebut.
 - b. Tidak terjalinnnya komunikasi yang baik antara ketua dan anggota LPMK, begitu juga dengan pemerintah kelurahan dan juga masyarakat. sehingga kesannya ketua LPMK bekerja sendiri.
 - c. Tidak adanya sosialisasi yang intensif tentang tugas dan fungsi LPMK kepada masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya dukungan mayarakat terhadap proram-program kerja LPMK.
 - d. Tidak tersedianya tempat bekerja yang memadai atau kantor untuk LPMK melakukan rapat-rapat anggota maupun bersama masyarakat dan ketua RT.
 - e. Kurangnya pembinaan oleh pihak pemerintah terhadap LPMK tentang bagaimana seharusnya LPMK itu menjalankan fungsinya.
 - f. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti kebersamaan dan budaya gotong-royong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006 “ *membangun desa partisipatif*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Awang, Azam 2010., “ *Implementasi Pemberdayaan Desa* ”. Jogyakarta, Pustaka Belajar.

- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Gunawan, Imam. 2013. "Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik". PT. Bumi Aksara; Jakarta.
- Haryanto, Dany, dan G. Nugrohadhi, Edwi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. PT. Prestasi Pustakaraya: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. "Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 & 2. Cetakan pertama, Jakarta- Rineka Cipta.
- Paramitha, Sekar. 2014. *Buku Sakti Menulis Skripsi, Tesis & Desertasi kurang dari 30 hari*", (Penerbit; Araska, Yogyakarta, Cetakan I.)
- Roode, Carlton Clymer dkk. 2000, "Pengantar Ilmu Politik". PT. Raja Grafindo Persada- Jakarta.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.
- Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.
- Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi*, 171.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 43-56.
- Rosyada, Dede Dkk, 2000 "Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani," (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah),

- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). *Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)
- Soleh, Chabib, 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, FOKUSMEDIA cetakaan Pertama Okt.
- Soekanto, Soerjono. dan Sulityowati, Budi, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi-45-Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarto Hetifa Sj, Inovasi.,2003, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia,).
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Yogya, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
- Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19-36.
- Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE* (Vol. 9, p. 169).
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).